

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Sanitasi Lingkungan

##### 2.1.1. Batasan dan Ruang Lingkup

Lingkungan dapat diartikan secara mudah sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Secara lebih terperinci, lingkungan disekitar manusia dapat dikategorikan dalam:

- Lingkungan fisik, termasuk di dalamnya adalah tanah, air, dan udara serta interaksi satu sama lain diantara faktor-faktor tersebut.
- Lingkungan biologi, termasuk dalam hal ini semua organisme hidup baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun mikroorganisme, kecuali manusia sendiri.
- Lingkungan sosial, termasuk semua interaksi antara manusia dari makhluk sesamanya yaitu meliputi faktor-faktor sosial, ekonomi, kebudayaan, psiko-sosial, dll.

Berdasarkan kategori di atas dapat diartikan pula bahwa lingkungan adalah kumpulan dari semua kondisi /kekuatan dari luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan dari suatu organisme hidup (manusia). *Kesehatan lingkungan* merupakan salah satu disiplin dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat dan merupakan perluasan prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi.

Ruang lingkup dari kesehatan lingkungan meliputi: 1). Penyediaan air minum, 2). Pengolahan air buangan, 3). Pengelolaan sampah padat, 4). Pengendalian vector, 5). Pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah, 6). Pengendalian pencemaran udara, 7). Hygiene makanan, 8). Perencanaan daerah perkotaan, dan lain-lain.

*Sanitasi lingkungan (Environmental Sanitation)*, secara relatif merupakan disiplin yang lebih terbatas yang sekarang telah dikembangkan menjadi kesehatan lingkungan. WHO mengemukakan definisi sanitasi lingkungan sebagai usaha pengendalian dari semua faktor-faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia.

Ruang lingkup sanitasi lingkungan terutama ditujukan kepada pengendalian (kontrol) dari:

- 1). Cara pembuangan dari ekskreta, air buangan dan sampah-sampah lainnya sehingga dapat menjamin bahwa cara-cara tersebut memadai dan aman.
- 2). Penyediaan air, untuk menjamin bahwa air yang digunakan oleh masyarakat cukup bersih dan sehat.
- 3). Perumahan, untuk menjamin bahwa rumah dapat memberikan rasa nyaman dan bebas dari kemungkinan penyebaran penyakit.
- 4). Makanan termasuk susu, untuk menjamin bahwa segala sesuatunya bersih dan aman.
- 5). Individu dan masyarakat agar terbiasa hidup sehat dan bersih.
- 6). Kondisi udara untuk menjamin bahwa udara luar bebas dari elemen yang merugikan, dan udara di dalam ruangan dapat mencukupi kebutuhan sesuai dengan aktifitas di dalamnya.
- 7). Dan lain-lain

### **2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan**

Lingkungan mempunyai pengaruh serta kepentingan relatif yang besar dalam hal peranannya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada diagram yang dikemukakan oleh Hendrik L. Blum (dalam Notoatmodjo, 2003) (Gambar 2.1.). Lebarnya anak panah menunjukkan besarnya peranan dan kepentingan relatif dari berbagai faktor terhadap derajat kesehatan masyarakat. Tampak lingkungan mempunyai pengaruh dan peranan yang terbesar, diikuti oleh perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan.

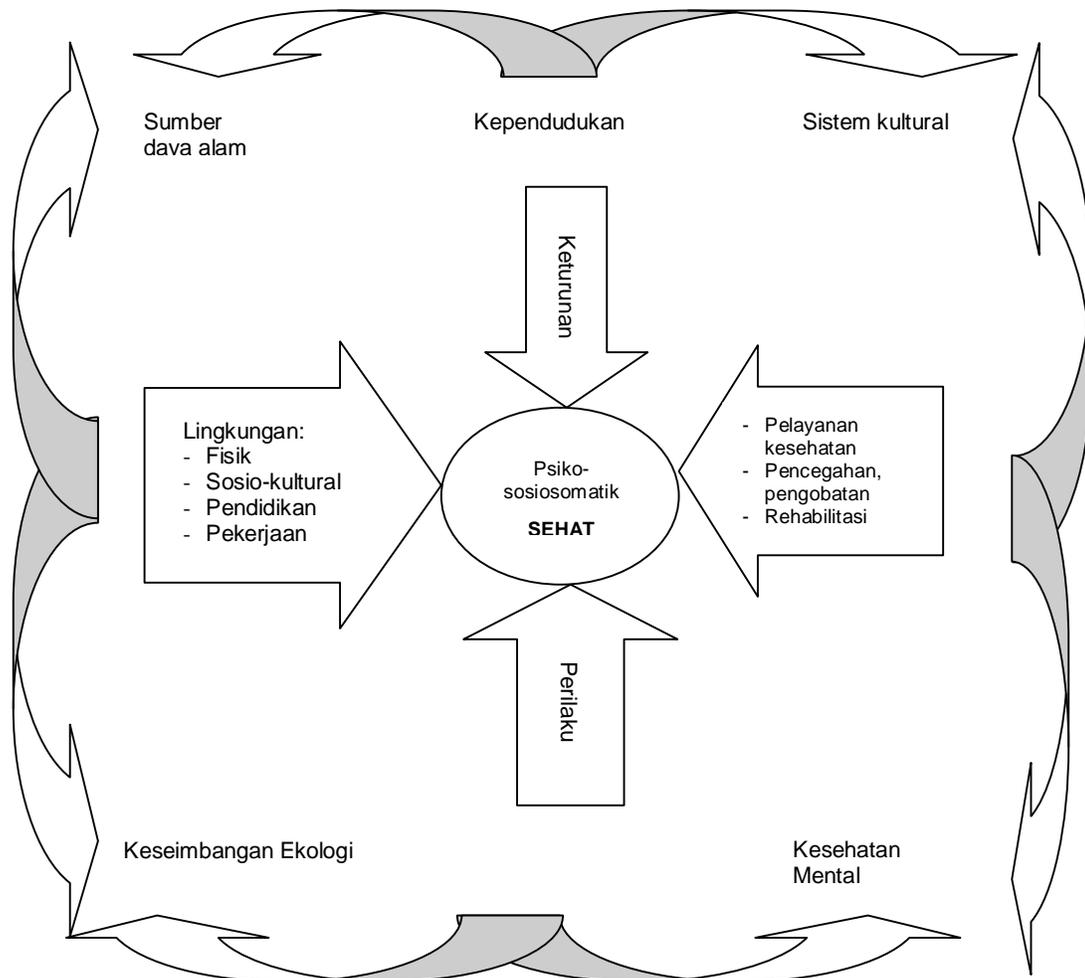
### **2.1.3. Hubungan Lingkungan, Agent dan Pejamu**

Dalam konsep SEHAT menurut WHO, disebutkan bahwa sehat meliputi keadaan sehat fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Sehat pada dasarnya adalah gambaran keadaan keseimbangan dari berbagai faktor. Faktor-faktor yang berperan tersebut umumnya dibagi menjadi tiga golongan yaitu: faktor agen (*agent*), pejamu (*host*) dan lingkungan (*environment*).

Faktor agen berasal dari sifat pembawa agen tersebut yang mempunyai kemampuan untuk menyebabkan penyakit pada manusia. Pejamu berhubungan dengan manusia, terutama mencakup faktor biologi (umur, jenis kelamin, suku bangsa, kekebalan khusus, dll) atau tingkah laku (dalam bentuk kebiasaan dan adat istiadat). Lingkungan mencakup semua aspek

di luar agen dan manusia, karena itu sangat beraneka ragam dan umumnya digolongkan menjadi 3 kategori yaitu yang berhubungan dengan aspek fisik, biologis dan sosial-ekonomi.

Demikianlah dalam rangka menciptakan keadaan lingkungan yang baik, yang dapat menunjang kehidupan dan atau kesehatan, pada saat ini telah banyak usaha yang dilakukan manusia. Bersamaan dengan itu telah pula banyak berkembang disiplin ilmu yang memusatkan perhatiannya pada keadaan lingkungan; satu diantaranya adalah ilmu kesehatan lingkungan (*environmental sanitation*).



**Gambar 2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan**

Sanitasi merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Banyaknya penyakit ditularkan karena tidak dilakukan cara-cara penanganan sanitasi yang

benar. Upaya peningkatan kualitas air bersih akan berdampak positif apabila diikuti upaya perbaikan sanitasi. Upaya sanitasi meliputi pembangunan, perbaikan dan penggunaan sarana sanitasi, yaitu: pembuangan kotoran manusia (jamban), sarana pembuangan air limbah (SPAL) dan pembuangan sampah di lingkungan rumah kita.

Masalah kesehatan lingkungan yang sering disoroti adalah berkisar pada sanitasi (jamban), penyediaan air minum, perumahan (*housing*), pembuangan sampah dan pembuangan air kotor (air limbah). Secara nasional pelayanan sanitasi dan kesadaran masyarakat untuk menunjang peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pada umumnya masih sangat rendah. Adapun permasalahan umum sistem pelayanan sanitasi perkotaan secara garis besar terdiri atas :

1. Kesadaran dan Sumber Daya Manusia yang rendah.
2. Manajemen tidak profesional
3. Tidak ada subsidi dari pemerintah Kabupaten / Kota
4. Makin mahal biaya investasi untuk pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan.
5. Rendahnya kontribusi pemerintah kabupaten / kota dalam peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.

## **2.2. Rumah Sehat**

Rumah adalah salah satu persyaratan pokok bagi kehidupan manusia. Rumah atau tempat tinggal manusia, dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

- Faktor lingkungan, baik fisik biologis maupun lingkungan sosial. Maksudnya membangun suatu rumah harus memperhatikan tempat dimana rumah itu didirikan (misal: di daerah panas, di daerah dekat gunung berapi, di pedesaan, dll)
- Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, hal ini dimaksudkan rumah yang dibangun berdasarkan kemampuan ekonomi pemiliknya.
- Teknologi yang dimiliki masyarakat, dalam rangka menerapkan teknologi tepat guna, maka teknologi yang sudah dimiliki masyarakat dapat dimodifikasi. Segi yang merugikan dikurangi dan mempertahankan segi yang positif.

### 2.2.1. Syarat-Syarat Rumah Sehat

#### A. Bahan bangunan

- a. **Lantai** : ubin atau semen adalah baik, namun tidak cocok untuk kondisi ekonomi pedesaan. Oleh karena itu lantai di daerah pedesaan cukup tanah biasa yang dipadatkan. Syarat yang penting di sini adalah tidak berdebu di musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan.
- b. **Dinding** : tembok adalah baik, namun disamping mahal, tembok sebenarnya kurang cocok untuk daerah tropis, lebih-lebih bila ventilasinya kurang / tidak cukup.
- c. **Atap genteng** adalah umum dipakai baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Di samping atap genteng adalah cocok untuk daerah tropis, juga dapat terjangkau oleh masyarakat. Atap seng atau asbes tidak cocok untuk rumah di pedesaan, karena selain mahal, juga dapat menambah suhu rumah menjadi panas.
- d. **Lain-lain** : tiang, kaso, reng. Kayu untuk tiang, bambu untuk kaso dan reng adalah umum di pedesaan, karena menurut pengalaman bahan-bahan ini tahan lama.

#### B. Ventilasi

Ventilasi rumah mempunyai banyak fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menjaga agar aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar. Hal ini berarti keseimbangan  $O_2$  yang diperlukan oleh penghuni rumah tersebut tetap terjaga. Ada 2 (dua) macam ventilasi, yakni ventilasi alamiah (aliran udara dalam ruang secara alamiah melalui jendela, pintu, lubang angin, dll) dan ventilasi buatan (mengggunakan alay khusus untuk mengalirkan udara).

#### C. Cahaya

Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup, tidak kurang dan tidak terlalu banyak. Kurangnya cahaya yang masuk ke dalam ruangan rumah, merupakan media atau tempat yang baik untuk hidup dan berkembangbiaknya bibit-bibit penyakit. Cahaya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Cahaya alamiah, yaitu matahari. Cahaya ini sangat penting, karena dapat membunuh bakteri-bakteri patogen di dalam rumah. Oleh karena itu rumah yang sehat harus mempunyai jalan masuk cahaya yang cukup. Seyogyanya jalan masuk cahaya (jendela) luasnya sekurang-kurangnya 15 – 20% dari luas lantai yang terdapat di dalam ruangan rumah.
- b. Cahaya buatan, yaitu menggunakan sumber cahaya yang bukan alamiah, seperti listrik, lampu minyak tanah, api dan sebagainya.

#### **D. Luas bangunan rumah**

Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan perjubelan (*overcrowded*). Hal ini tidak sehat, sebab disamping menyebabkan kurangnya konsumsi O<sub>2</sub> juga bila salah satu anggota terkena penyakit infeksi, akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain. Luas bangunan yang optimum adalah apabila dapat menyediakan 2,5 – 3 m<sup>2</sup> untuk tiap anggota keluarga.

#### **2.2.2. Fasilitas –Fasilitas dalam Rumah Sehat**

Rumah yang sehat harus mempunyai fasilitas-fasilitas sebagai berikut :

- a. Penyediaan air bersih yang cukup
- b. Pembuangan tinja
- c. Pembuangan air limbah
- d. Pembuangan sampah
- e. Fasilitas dapur
- f. Ruang berkumpul keluarga

Disamping fasilitas tersebut, ada fasilitas lain yang perlu diadakan tersendiri untuk rumah pedesaan, yaitu:

- g. Gudang
- h. Kandang ternak

#### **2.3. Penyediaan Air Bersih**

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum, dimana persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologis dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping. Persyaratan tersebut juga memperhatikan pengamanan terhadap sistem distribusi air bersih dari instalasi air bersih sampai pada konsumen.

Selain sebagai pemenuhan kebutuhan harian bagi masyarakat, air bersih sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan pertanian – peternakan, perikanan darat, pariwisata, industri, dan mendukung kelancaran kegiatan perdagangan. Tingkat kebutuhan perkapita

sangat tergantung dari kelas sosial dan perilaku individu pada suatu masyarakat. Secara umum kebutuhan perkapita adalah 150 liter/orang/hari ( Dept. Pekerjaan Umum ).

Pengertian air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan yang dapat diminum. Alasan kesehatan dan teknis yang mendasari penentuan standar kualitas air minum adalah efek-efek dari setiap parameter jika melebihi dosis yang telah ditetapkan. Pengertian dari standar kualitas air minum adalah batasan operasional dari kriteria kualitas air dengan memasukkan pertimbangan non teknis, misalnya kondisi sosial ekonomi, target atau tingkat kualitas produksi, tingkat kesehatan yang ada dan teknologi yang tersedia. Sedangkan kriteria kualitas air merupakan putusan ilmiah yang mengekspresikan hubungan dosis dan respon efek, yang diperkirakan terjadi kapan dan dimana saja unsur-unsur pengotor mencapai atau melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam waktu tertentu. Dengan demikian, maka kriteria kualitas air merupakan referensi dari standar kualitas air.

#### **2.4. Pengelolaan Air Limbah**

Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat – tempat umum lainnya. Pada umumnya air ini mengandung bahan-bahan atau zat – zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Batasan lain mengatakan bahwa air limbah adalah kombinasi dari cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri, bersama – sama dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan yang mungkin ada.

Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa air buangan adalah air yang tersisa dari kegiatan manusia, baik kegiatan rumah tangga maupun kegiatan lain seperti industri, perhotelan, dan sebagainya. Meskipun merupakan sisa air , namun volumenya besar, karena lebih kurang 80 % dari air yang digunakan kegiatan manusia sehari – hari dibuang dalam bentuk yang sudah kotor ( tercemar ). Untuk kemudian air limbah ini akan mengalir ke sungai dan laut dimana air ini digunakan manusia kembali. Oleh sebab itu air buangan ini harus dikelola dan atau diolah secara baik.

#### **2.5. Pembuangan Kotoran Manusia**

Dengan bertambahnya penduduk yang tidak sebanding dengan area permukiman, masalah pembuangan kotoran manusia meningkat pula. Dilihat dari segi kesehatan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia merupakan masalah pokok untuk sedini mungkin diatasi. Oleh karena kotoran manusia (*faeces*) adalah sumber penyebaran penyakit yang multikompleks. Penyebaran penyakit yang bersumber pada *faeces* dapat melalui

berbagai macam cara. Disamping dapat secara langsung mengkontaminasi makanan, minuman, sayuran, dsb, juga dapat mengkontaminasi air, tanah, dan tubuh kita.

Untuk mencegah sekurang-kurangnya mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan, maka pembuangan tinja harus dikelola dengan baik (harus di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pembuangan kotoran manusia antara lain:

- 1). Sebaiknya jamban tertutup, terlindung dari panas/hujan, serangga dan pandangan orang.
- 2). Bangunan jamban sebaiknya memiliki lain yang kuat, dll
- 3). Bangunan jamban sedapat mungkin ditempatkan pada lokasi yang tidak mengganggu pandangan
- 4). Sedapat mungkin disediakan alat pembersih (air, kertas pembersih)

Teknologi pembuangan kotoran manusia untuk daerah pedesaan sudah barang tentu berbeda dengan teknologi jamban di daerah perkotaan. Oleh karena itu teknologi jamban di daerah pedesaan disamping harus memenuhi persyaratan-persyaratan jamban sehat juga harus didasarkan pada sosiobudaya dan ekonomi masyarakat.

## **2.6. Sampah dan Pengelolaannya**

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang. Dengan demikian sampah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya sesuatu benda atau bahan padat
- b. Adanya hubungan langsung / tak langsung dengan kegiatan manusia
- c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi.

Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah-sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab penyakit (bakteri patogen) dan juga binatang serangga sebagai pemindah/penyebarkan penyakit (vektor). Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik, bukan saja untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga untuk keindahan lingkungan. Pengelolaan sampah disini yang dimaksud adalah meliputi pengumpulan dan pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

## 2.7. Perbaikan Lingkungan Permukiman

Lingkungan permukiman adalah kawasan di sekitar permukiman yang dapat berupa lingkungan alam, lingkungan binaan, maupun lingkungan sosial. Keberadaan lingkungan di sekitar permukiman itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap permukiman. Pengembangan suatu wilayah, biasanya berkaitan dengan pengembangan perekonomian dan pertumbuhan penduduk, dan perencanaan wilayah umumnya disusun dengan pertimbangan pengembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam keterpaduan pembangunan wilayah, peran serta masyarakat perlu ditekankan dan peran serta pemerintah daerah semakin dituntut dengan ide-ide baru yang kreatif serta sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat. Disamping itu, yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan wilayah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga resiko kerusakan lingkungan dapat dihindarkan. Menurut AGENDA 21 (HABITAT AGENDA 21), langkah-langkah yang perlu diambil dalam perbaikan permukiman antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program-program pembangunan wilayah perkotaan secara terpadu.
2. Dalam program-program tersebut, termasuk : Penyediaan lapangan kerja bagi penduduk miskin, termasuk dukungan terhadap sektor informal. Penyediaan sarana sosial untuk menanggulangi kelaparan dan ketiadaan tempat tinggal, dan penyediaan sarana kesehatan dan pendidikan, serta sarana pelayanan yang lain.
3. Untuk pengelolaan permukiman, harus menyertakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.
4. Menyediakan prasarana lingkungan yang memadai, seperti : air bersih, sanitasi lingkungan, saluran pengeringan dan pengelolaan limbah padat; yang sangat dibutuhkan untuk melindungi lingkungan permukiman termasuk permukiman informal, menaikkan produktifitas penghuni, mengusahakan kesehatan yang lebih baik dan menanggulangi kemiskinan.
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pembangunan permukiman, serta meningkatkan kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah.

Melihat peran permukiman dalam pengembangan wilayah, dapat dikatakan bahwa perannya sebagai pendukung suatu kawasan pembangunan adalah cukup penting. Yaitu peran sebagai pembuka kawasan baru, menyediakan lapangan kerja baru, pengembangan tata ruang dan penggunaan lahan, memadukan pengembangan permukiman dengan ekonomi regional.

Adapun yang dimaksud dengan permukiman pada kegiatan ini adalah seluruh kawasan tempat hidup nelayan, termasuk rumah-rumah nelayan, halaman disekitar rumah,

tempat mengolah dan menjemur ikan, pantai disepanjang tempat tinggal, serta fasilitas sosial yang ada.

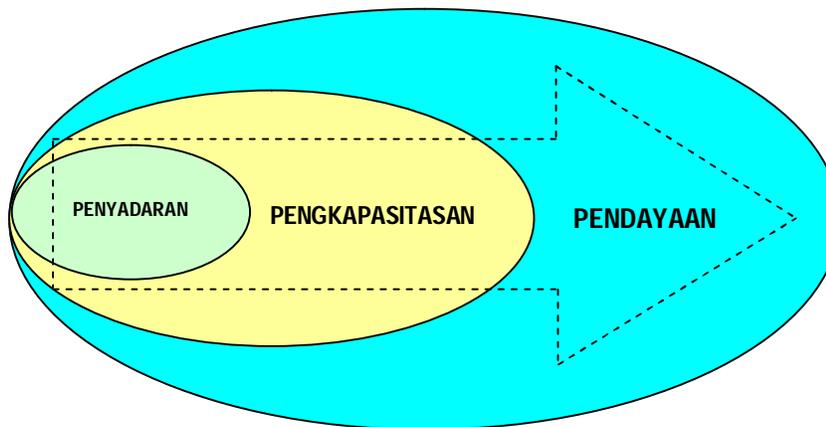
## **2.9. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah konsep yang paling sering kita pergunakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris "*empowerment*" yang juga dapat bermakna sebagai "pemberian kekuasaan", karena power bukan sekadar "daya" tetapi juga "kekuasaan", sehingga kata "daya" tidak saja bermakna "mampu" tetapi juga "mempunyai kuasa". Hal ini berarti upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum (Setiana, 2005). Pada dasarnya, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1996 dalam Setiana, 2005).

Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat.

### **2.9.1. Tiga Sisi Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi" , bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, maka pemberdayaan mempunyai tiga tahapan : penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Sederhananya dapat digambarkan seperti terlihat di Gambar 2.1. sebagai berikut:



Gambar 2.1. Tiga Sisi Pemberdayaan

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini, target yang hendak diberdayakan diberikan "pencerahan" dalam bentuk diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu". Misalnya target nya adalah kelompok masyarakat yang miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.

Pada tahap ini program-program yang dapat dilakukan misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, *belief* dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "*demand*") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang luar).

Setelah menyadari, maka tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering kita sebut sebagai "*capacity building*", atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomkan diberi program pemampuan atau *capacity building* untuk membuat mereka "cakap" (*skilfull*) di dalam mengelola otonomi yang diberikan. Proses *capacity building* terdiri dari tiga jenis: manusia, organisasi dan sistem nilai.

Pengkapasitasan manusia di dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Arti dasarnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.

Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Misalnya sebelum diberikan peluang usaha, maka kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). Agar menjadi efisien dalam manajemennya, maka daerah otonom ditata ulang organisasinya sehingga berpola *structure follow functions*.

Pengkapasitasan ketiga adalah sistem nilai. Setelah orang dan wadahnya dikapitasikan, maka sistem nilainya pun demikian juga. Sistem nilai adalah "aturan main". Dalam cakupan suatu organisasi, maka sistem nilai tersebut berkenaan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, Peraturan koperasi, dan sejenisnya. Pada tingkat yang lebih maju, maka sistem nilai terdiri pula oleh budaya organisasi, etika dan *good governance*.

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau "*empowerment*" dalam makna sempit. Pada tahap ini, kepada terget diberikan daya, kekuatan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

### 2.9.2. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep sederhana tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu : suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Di dalam pengertian sederhana tersebut, ternyata ada empat kata kunci yang maknanya sangat strategis, yaitu : **Pertama**, adalah kata "proses yang berjalan terus menerus". Kata ini bukan saja merujuk pada adanya nilai kesinambungan atau kontinuitas, tapi ternyata juga merujuk pada adanya proses yang sistematis, alamiah serta seimbang. Artinya di dalam prosesnya sendiri ada ukuran-ukuran idealisme output dengan kemampuan realisasinya secara obyektif. **Kedua**, "adanya peningkatan kemampuan". Proses berkesinambungan tadi tetap saja harus diikuti dengan konsistensi terhadap tujuan proses itu sendiri, yakni pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam berbagai dimensinya. Artinya apa yang dilakukan haruslah ada input positifnya bagi masyarakat yang menjadi subyek pemberdayaan. Masyarakat bukanlah sapi perahan yang hanya dibutuhkan ketika punya kepentingan untuk memerahnya. **Ketiga**, "adanya peningkatan kemandirian". Kemandirian bagi masyarakat adalah sesuatu yang cukup penting nilainya. Nilai ini penting karena di dalam makna mandiri ternyata ada sejumlah faktor yang mempengaruhi sejauhmana tingkat kemandirian sebuah pihak pada pihak yang lain. Adapun faktor-faktor itu adalah : fasilitas, daya dukung finansial, Keempat, "bertujuan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik".

Dalam cakupan kata-kata ini, berarti menunjukkan bahwa pemberdayaan selain mengandung aspek skill atau kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang, ia juga haruslah berorientasi ke depan. Dalam kerangka ini, peningkatan taraf hidup dinilai hal yang signifikan dengan tujuan besar pemberdayaan.

### **2.9.2.1. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Dari sekian banyak tahapan pemberdayaan masyarakat, beberapa model yang cukup populer adalah :

1. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya.
2. Mengembangkan rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian
3. Menerapkan rencana tersebut
4. Secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya (Monitoring dan Evaluasi / M&E)

Kemudian temuan-temuan monitoring dan evaluasi dikaji (kembali ke tahap (a). Kemudian rencana perlu disesuaikan atau, kalau tujuan sudah tercapai, akan disusun rencana pengembangan baru (tahap (b). Pelaksanaan tahap-tahap di atas sering jalan bersamaan dan lebih bersifat proses yang diulangi terus-menerus. PM kerap kali dilakukan melalui pendekatan kelompok di mana anggota bekerjasama dan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Untuk pengembangan kelompok ada kegiatan-kegiatan khusus yang sedang dilaksanakan dan juga ada kegiatan lainnya.

### **2.9.2.2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang *Deficit based* dan *Strength Based*. Pendekatan *Deficit-based* terpusat pada berbagai macam permasalahan yang ada serta cara-cara penyelesaiannya. Keberhasilannya tergantung pada adanya identifikasi dan diagnosis yang jelas terhadap masalah, penyelesaian cara pemecahan yang tepat, serta penerapan cara pemecahan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya situasi saling menyalahkan atas masalah yang terjadi.

Di sisi lain, pendekatan *Strength Based* (Berbasis kekuatan) dengan sebuah produk metode *Appreciative Inquiry* terpusat pada potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan

yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk menjadikan hidup lebih baik. *Appreciative Inquiry* merupakan sebuah metode yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang positif dengan memfokuskan pada pengalaman positif dan masa depan yang penuh dengan harapan (Cooperrider dan Srivastva, 1987; Cooperrider dkk., 2000; Fry dkk, 2002; Ludema dkk, 2000, dalam Gergen dkk., 2004).

Dalam sepuluh tahun terakhir, *Appreciative Inquiry* menjadi sangat populer dan dipraktikkan di berbagai wilayah dunia, seperti untuk mengubah budaya sebuah organisasi, melakukan transformasi komunitas, menciptakan pembaharuan organisasi, mengarahkan proses merger dan akuisisi dan menyelesaikan konflik. Dalam bidang sosial, *Appreciative Inquiry* digunakan untuk memberdayakan komunitas pinggiran, perubahan kota, membangun pemimpin religius, dan menciptakan perdamaian.

Dalam pengembangan masyarakat muncul dan berkembang bermacam-macam model pendekatan yang dapat dimanfaatkan. Sering kali masyarakat mendapat bantuan fisik dari pihak luar. Namun sering kali juga bantuan tidak berlanjut dan setelah program selesai bantuan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat. Untuk jangka pendek masalah dapat dipecahkan, tetapi untuk jangka panjang tidak ada perbaikan. Pada intinya, Sangatlah penting bagi petugas lapang untuk mengetahui apa itu Pemberdayaan Masyarakat dan apa perbedaannya dengan Pembinaan. Pembinaan adalah intervensi dari orang luar yang mengambil inisiatif, memutuskan dan melakukan sesuai pikirannya sendiri. Masyarakat 'diikutkan' sebagai obyek pembangunan. Pihak luar berperan sebagai 'pembina'. Pemberdayaan adalah proses dari, oleh dan untuk masyarakat, di mana masyarakat didampingi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam pengembangan dan peningkatan taraf hidupnya. Masyarakat adalah subyek pembangunan. Pihak luar berperan sebagai fasilitator. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat difasilitasi oleh pihak luar untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan mengakses dan menggunakan sumber daya setempat. Dengan demikian, pemecahan masalah dan pengembangannya berkelanjutan dan ketergantungan masyarakat pada pihak-pihak dan bantuan luar dapat dikurangi.

## **2.10. Memberdayakan Masyarakat Pesisir**

Upaya menggali dan membangkitkan partisipasi masyarakat pesisir pada khususnya dan pembangunan masyarakat pesisir pada umumnya, diperlukan sedikit pengetahuan mengenai karakteristik masyarakat pesisir. Dengan mengetahui karakteristik masyarakat

pesisir diharapkan dapat diketahui pola hidup dan kebiasaan masyarakat pesisir baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Karakteristik yang dimiliki masyarakat pesisir tersebut tidak lepas dari kondisi fisik alam dari wilayah pesisir itu sendiri.

*Horton et.al. (1991)* mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup bersama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatannya didalam kelompok tersebut.

Masyarakat pesisir memiliki komunitas kecil dengan beberapa ciri-ciri diantaranya yaitu :

1. Mempunyai identitas yang khas;
2. Terdiri dari jumlah penduduk dengan jumlah yang cukup terbatas sehingga masih saling mengenal sebagai individu yang berkepribadian;
3. Bersifat seragam dengan diferensiasi terbatas;
4. Kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas sehingga semua dapat dipenuhi sendiri tanpa tergantung pada pasar di luar.

Karakteristik masyarakat pesisir sebagai representasi komunitas desa pantai dan desa terisolasi dibagi menjadi beberapa aspek :

1. Sistem pengetahuan

Sistem pengetahuan tradisional nelayan suku laut terhadap lingkungan hidupnya cukup tinggi. Pengetahuan lokal tersebut merupakan kekayaan intelektual mereka yang hingga kini terus dipertahankan.

2. Sistem kepercayaan

Secara teologis, nelayan masih memiliki kepercayaan yang kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis sehingga perlu perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin.

3. Peran wanita

Aktivitas ekonomi wanita merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, tidak terkecuali wanita yang berstatus sebagai istri nelayan. (*Kusnadi, 2001*).

4. Posisi sosial nelayan

Posisi nelayan dalam masyarakat menarik untuk dicermati juga secara kultural maupun struktural. Hal ini karena di kebanyakan masyarakat nelayan memiliki status yang relatif rendah. Rendahnya posisi sosial nelayan adalah akibat keterasingan nelayan.

Keterasingan tersebut terjadi karena sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lain.

### 2.11. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam di Bidang Kesehatan

Konsep pemberdayaan masyarakat –dalam hal ini mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran terhadap hak dan kewajibannya- bukanlah hal yang mudah diimplementasikan. Pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban memberdayakan masyarakatnya, belum menjalankannya dengan baik, sehingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang justru tidak berdaya. Lembaga-lembaga non pemerintah -seperti LSM, Institusi pendidikan- banyak pula yang melakukan upaya pemberdayaan ini.

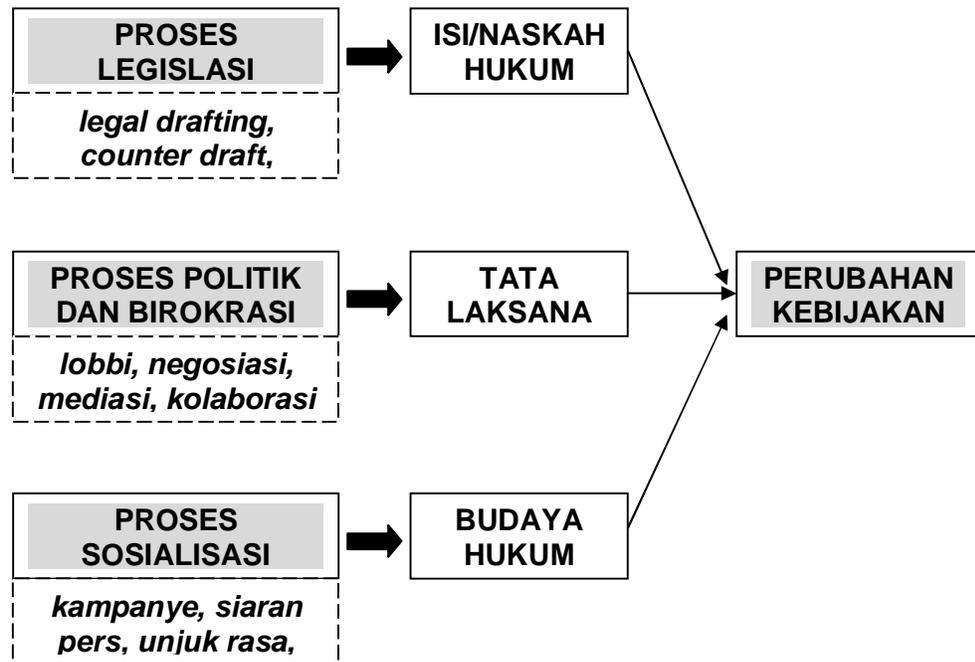
Berikut beberapa metode pemberdayaan masyarakat yang ada di masyarakat.

#### a. Advokasi

- Advokasi berasal dari „Advocacy“ (bahasa Inggris) yang berarti pembelaan, dukungan, anjuran.
- Advokasi adalah usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan sistematis dalam kebijakan tertentu, regulasi atau pelaksanaannya.
- Advokasi adalah upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.

Contoh: Udara Jogja saat ini sudah tidak lagi bersih dan sehat, akibat polusi. Berbagai kalangan sudah menyatakan keprihatinan. Sehingga berbagai upaya dilakukan agar pemerintah Jogja membuat regulasi untuk mengurangi polusi udara. Kemudian dilakukan penelitian-penelitian untuk membuktikan dan memberikan data ilmiah tentang kondisi udara Jogja. Data-data tersebut dijadikan dasar untuk mendesak lembaga eksekutif dan legislatif Jogja untuk mengeluarkan regulasi-regulasi tentang emisi gas buang kendaraan bermotor, larangan merokok di ruang publik. Kampanye udara bersih juga dilakukan oleh berbagai kalangan.

Gambar di bawah ini menjelaskan secara skematis upaya advokasi dalam mencapai tujuan berupa kebijakan publik.



**b. Pendampingan (*support group*)**

Pemberdayaan dengan metode pendampingan memerlukan tiga kondisi yang perlu ada agar terbangun atau terlaksana kegiatan yang bersifat memberdayakan. Ketiga kondisi tersebut meliputi:

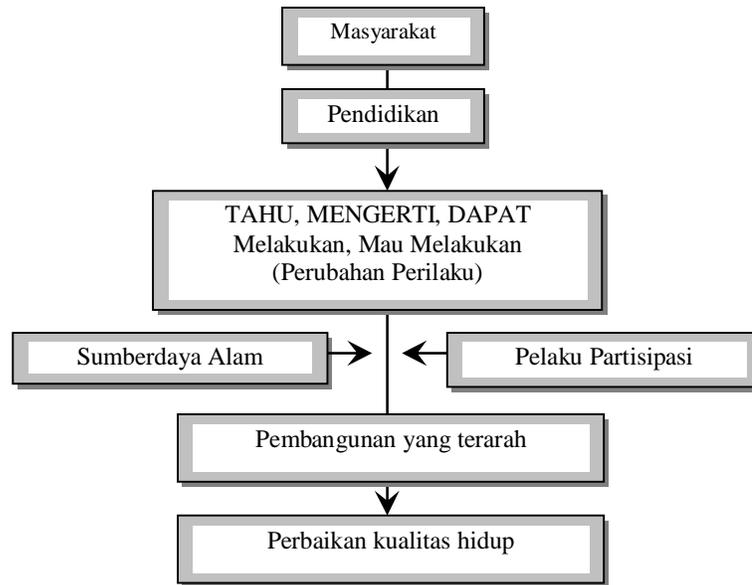
- i. Pertemanan adalah bersikap dan berperilaku sebagai teman dan tidak *judgemental* terhadap kelompok sasaran.
- ii. Kesetaraan adalah menempatkan diri sama dengan kelompok sasaran (tidak ada sub-ordinasi)
- iii. Partisipasi adalah melibatkan kelompok sasaran mulai dari perencanaan sampai evaluasi kegiatan.

Program pendampingan akan lebih efektif jika disertai dengan pembagian media promosi kesehatan (buklet, *leaflet*, poster). Idealnya kegiatan pendampingan dilakukan secara rutin seminggu 2 kali rutin dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan atau sampai kelompok sasaran tersebut mandiri/berdaya (tidak perlu didampingi lagi). Prinsip pertemanan, kesetaraan dan partisipasi harus selalu dimiliki oleh petugas lapangan di bidang pendampingan.

**c. Pendidikan**

Melalui pendidikan, masyarakat dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan, sehingga masyarakat menjadi tahu, mengerti, dapat melakukan dan mau melakukan sesuatu untuk peningkatan kualitas hidup. Perubahan perilaku ini apabila dipadukan dengan sumber daya alam yang tersedia, akan melahirkan perilaku baru yang disebut partisipasi. Partisipasi ini akan merangsang masyarakat lebih aktif dan kreatif melaksanakan pembangunan yang terarah dan berencana terutama dalam meningkatkan pendapatan *-income generating-* serta membuka lapangan kerja baru *-employment generating-* untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat. (Tampubolon, 2001).

Apabila pendidikan ini diterapkan pada pendidikan kesehatan, maka akan berpengaruh pada perilaku sebagai hasil jangka menengah (*intermediate impact*) dari pendidikan kesehatan. Selanjutnya perilaku kesehatan akan berpengaruh pada meningkatnya indikator kesehatan masyarakat sebagai keluaran (*outcome*) pendidikan kesehatan.



Gambar 2.2. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat.  
Sumber: Tampubolon, 2001

### 1. Pendidikan Formal

Pendidikan pada hakikatnya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia baik individu maupun sosial. Dengan kata lain pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan. Proses pemberdayaan di bidang pendidikan merupakan pendekatan holistik yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, sistem belajar mengajar, institusi atau lembaga pendidikan dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya.

Keberhasilan pendidikan sebagai proses pemberdayaan sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas pendidikan nasional, seperti kualitas guru (pendidik), relevansi dan kompetensi kurikulum, pemerataan kesempatan, dan efisiensi biaya pendidikan.

### 2. Pendidikan Informal

Pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun komunitas, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan untuk melakukan transformasi sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar seumur hidup.

Kehidupan bermasyarakat perlu dikondisikan sebagai sebuah wadah di mana setiap anggotanya melalui aktivitas sehari-hari saling belajar dan mengajar. Proses interaksi sosial ini akan membuat petukaran informasi dan pengetahuan terjadi, dan mendorong setiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

### **2.9.3. Model Pemberdayaan**

Penanganan persoalan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan memerlukan suatu pendekatan pemberdayaan atau yang disebut Model Pemberdayaan. Model dipahami sebagai tiruan atau abstraksi dari suatu realitas yang sangat kompleks untuk digunakan sebagai sarana memahami dan menyederhanakan melalui suatu sistematika tertentu. Beberapa model pemberdayaan adalah:

#### **a. Model Partisipatif**

Model ini dikembangkan atas dasar satu filosofi bahwa tanpa keterlibatan semua pihak, maka persoalan apapun yang dihadapi bersama oleh masyarakat akan menemui kendala dalam penanganannya. Model ini sangat membantu penyelesaian persoalan bersama karena sangat demokratis, mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan individu yang berbeda, sehingga ada proses saling mengisi satu sama lain. Penyatuan visi dan misi dengan model ini dapat dicapai melalui proses musyawarah dan mufakat terhadap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, tindakan yang merusak dari kalangan warga akan bisa ditangani melalui upaya membangun kesepakatan terhadap kasus tertentu sehingga sebelum pelaksanaan satu kegiatan dapat terantisipasi lebih dahulu.

#### **b. Model Penyadaran dan Peningkatan Kemampuan**

Model penyadaran adalah langkah strategis lainnya disamping model partisipatif. Tumbuhnya kesadaran akan menggerakkan warga melakukan tindakan tertentu dalam menangani persoalan yang dihadapinya. Adanya persoalan lingkungan yang buruk, air minum yang tidak sehat dan kebiasaan meremehkan penyakit lingkungan adalah berawal dari rendahnya kesadaran akan hal tersebut.

### **c. Model Sistemik**

Persoalan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan bukanlah semata-mata dapat diselesaikan oleh warga permukiman sendiri. Hal ini memerlukan keterlibatan semua pihak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- 1). Kebijakan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah dan tata ruang wilayah.
- 2). Memadukan program pemberdayaan ekonomi dan penyehatan lingkungan
- 3). Memadukan dan menyelaraskan program pembangunan sosial dan budaya .
- 4). Memadukan program kesehatan masyarakat dan penyehatan lingkungan permukiman.
- 5). Peningkatan peranan wanita.

## **2.4. Tahapan Pemberdayaan**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap, terencana, sistematis dan berkelanjutan, mengingat masyarakat mengalami dinamika yang cepat sehingga mempengaruhi pola hubungan antar sesama. Kebersamaan adalah modal dasar yang harus ditumbuhkan dalam rangka pemberdayaan. Adapun tahapan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

### **1. Persiapan**

Langkah-langkah dalam persiapan sebagai berikut:

- Penyuluhan melalui RT, RW dan lingkungan
- Pendidikan kesehatan lingkungan di tingkat keluarga
- Penyebaran informasi ke berbagai pihak
- Pelatihan dan pendidikan lingkungan secara swadaya
- Musyawarah di tingkat lingkungan

### **1. Pelaksanaan**

Tahapan ini merupakan pengetahuan/ketrampilan yang diberikan selama tahapan persiapan sehingga rencana aksi pemberdayaan dapat diwujudkan dengan rencana pelaksanaan. Adapun kegiatan dalam pelaksanaan antara lain: gotong royong membersihkan lingkungan, pembangunan TPA, lomba kali/sungai bersih.

### **3. Penilaian, Pengawasan dan Pengendalian**

Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk menilai, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan sehingga sesuai dengan yang ditetapkan

sebelumnya. Pada tahap ini dapat diketahui kelemahan dan kelebihan proses pemberdayaan sehingga dapat diperbaiki kekurangan pada masing-masing tahapan.

#### **4. Pematapan**

Tahap ini merupakan upaya perbaikan terhadap kondisi yang sudah cukup baik menjadi lebih baik. Masyarakat telah sadar akan pentingnya mengkonsumsi air minum yang sehat dan mulai menyadari menata lingkungannya sehingga perlu ditopang dengan berbagai hal lainnya guna tercapainya perilaku yang semakin baik. Adapun hal-hal yang diperlukan dalam tahap ini antara lain:

- Penyusunan norma /aturan yang berlaku sesama penghuni lingkungan permukiman
- Adanya kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penyehatan lingkungan
- Pematapan dan pemeliharaan sarana-sarana pendukung
- Bantuan tenaga teknis
- Adanya lembaga khusus yang mengurus, misalnya karang taruna
- Agenda rutin seperti: Jum'at bersih atau Minggu bersih

#### **5. Pembiasaan**

Pembiasaan adalah upaya yang dilakukan guna menjadikan kondisi dan situasi berjalan secara mandiri , tanpa adanya paksaan, bujukan, teguran atau perintah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pembiasaan ini antara lain adalah:

- Program/kegiatan rutin penyehatan lingkungan permukiman
- Pendanaan secara swadaya
- Pelarangan pembuangan sampah sembarangan
- Pemasangan papan pelarangan /anjuran memelihara lingkungan

#### **2.9.4. Perilaku Kesehatan**

Perilaku kesehatan pada dasarnya adalah respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan serta lingkungan. Dengan demikian secara lebih terinci perilaku kesehatan ini mencakup :

- a. Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit, yaitu bagaimana manusia berespon, baik secara pasif (mengetahui, berpersepsi dan bersikap terhadap sakit yang ada di diri

- dan di luar dirinya), maupun aktif (tindakan) yang dilakukan sehubungan dengan penyakit dan sakit tersebut.
- b. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan, yaitu respon seseorang terhadap sistem pelayanan kesehatan baik modern maupun tradisional meliputi : fasilitas pelayanan, cara pelayanan, petugas kesehatan dan obat-obatan.
  - c. Perilaku terhadap makanan, yaitu respon seseorang terhadap makanan sebagai makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan, yang meliputi: pengetahuan, persepsi, sikap dan praktek kita terhadap makananserta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.
  - d. Perilaku terhadap lingkungan kesehatan, adalah respon seseorang terhadap lingkungan sebagai determinan kesehatan manusia. Perilaku ini antara lain mencakup:
    - i. Perilaku sehubungan dengan air bersih, termasuk di dalamnya komponen, manfaat dan penggunaan air bersih untuk kepentingan kesehatan.
    - ii. Perilaku sehubungan dengan pembuangan air kotor, yang menyangkut segi higienic, pemeliharaan dan penggunaannya.
    - iii. Perilaku sehubungan dengan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair, termasuk sistem pembuangan sampah dan air limbah yang sehat serta dampak pembuangan limbah yang tidak sehat.
    - iv. Perilaku sehubungan dengan rumah sehat, yang meliputi ventilasi, pencahayaan, lantai dan sebagainya.
    - v. Perilaku sehubungan dengan pembersihan sarang-sarang nyamuk (vektor) dan sebagainya.

Di dalam proses pembentukan dan atau perubahan, perilaku dipengaruhi oleh antara lain: susunan syaraf pusat, persepsi, motivasi, emosi, proses belajar, lingkungan dan sebagainya.

Perubahan-perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat diketahui melalui persepsi. Persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui pancaindra. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda, meskipun mengamati obyek yang sama. Motivasi yang diartikan sebagai suatu dorongan untuk bertindak dalam mencapai tujuan, juga dapat terwujud dalam bentuk perilaku. Perilaku juga dapat timbul karena emosi yang berhubungan erat dengan keadaan jasmani. Belajar diartikan sebagai suatu proses perubahan perilaku yang dihasilkan dari praktek dalam lingkungan kehidupan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku itu dibentuk melalui suatu proses dan

berlangsung dalam interaksi manusia dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu faktor intern dan ekstern.

Faktor intern mencakup: pengetahuan, kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi dan sebagainya yang berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar. Sedangkan faktor ekstern meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non fisik seperti: iklim, manusia, sosial ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.

#### **2.9.4. Partisipasi Masyarakat**

Definisi tentang partisipasi masyarakat telah banyak dijelaskan oleh pakar maupun instansi. Beberapa definisi tentang partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan secara terus-menerus dan aktif dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan umum. (Antoft dan Novack ,1998)
- Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu (Britha Mikkelsen, 2003).
- Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka (Britha Mikkelsen, 2003).
- Partisipasi masyarakat dapat dipandang sebagai agen atau wakil dari tindakan atau program-program yang dijalankan oleh pemerintah dan sebagai salah satu hal yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan penerapan kebijaksanaan. (Richard Batley, 1982)
- Partisipasi adalah suatu tindakan yang mendasar untuk bekerja sama yang memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju, apabila ada kepercayaan bersama.

Terdapat dua maksud mendasar diperlukannya partisipasi masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- bahwa pembangunan diperuntukkan bagi anggota masyarakat dan oleh karena itu mereka harus ikut menentukan apa yang baik bagi mereka.
- Sejalan dengan harkat itu sendiri, yang memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang baik bagi hidupnya.

### 2.9.5. Modal Sosial

Konsep modal sosial (*social capital*) diperkenalkan Robert Putnam (1993) sewaktu meneliti Italia pada 1985. Masyarakatnya, terutama di Italia Utara, memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi karena tiap individu punya minat besar untuk terlibat dalam masalah publik. Hubungan antarmasyarakat lebih bersifat horizontal karena semua masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut Putnam (1993), modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokratis. Schaft dan Brown (2002) mengatakan bahwa modal sosial adalah norma dan jaringan yang melancarkan interaksi dan transaksi sosial sehingga segala urusan bersama masyarakat dapat diselenggarakan dengan mudah (Iksan, 2007)

Berdasarkan keterangan tersebut, modal sosial dapat diartikan sebagai kerja sama antarwarga untuk menghasilkan tindakan kolektif. Pilar modal sosial, menurut Paldam (2000), adalah kepercayaan (*trust*), eksistensi jaringan (*network*), dan kemudahan bekerja sama (*easy of cooperation*). Modal sosial dapat memberikan pencerahan tentang makna kepercayaan, kebersamaan, toleransi dan partisipasi sebagai pilar penting pembangunan masyarakat sekaligus pilar bagi demokrasi dan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) yang sedang marak dipromosikan (Iksan, 2007)

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui penguatan modal sosial (berbasis penguatan nilai-nilai budaya). Jika penguatan modal sosial hanya dipandang sebagai pengembangan pilar modal sosial tersebut, hal ini dinilai masih superfisial dan belum menyentuh langsung akar atau inti dari penguatan modal sosial itu sendiri. Inti dari modal sosial adalah nilai-nilai budaya. Selain nilai-nilai budaya, elemen modal sosial yang dinilai penting dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah kompetensi SDM/sumberdaya manusia (*human capital*), manajemen sosial dan keorganisasian masyarakat madani (*civil society*) yang kuat, struktur sosial yang tidak timpang, kepemimpinan lokal yang kuat, sistem moral dan hukum yang kuat dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.